

BAB II

DINAMIKA ISU *JUGUN IANFU* DALAM HUBUNGAN BILATERAL KOREA SELATAN-JEPANG

Secara umum dalam bab II ini akan dijelaskan tentang bagaimana dinamika isu *jugun ianfu* memengaruhi hubungan bilateral yang terjalin antara Korea Selatan-Jepang. Hal tersebut mencakup bagaimana perspektif masing-masing negara dalam memandang isu ini, selain itu juga membahas mengenai bagaimana hubungan yang terjalin antara Korea Selatan-Jepang terkait dengan isu tersebut terutama pada masa pemerintahan Presiden Park Geun-hye. Dari awal masa kepemimpinannya hingga tercapainya perjanjian antara Korea Selatan-Jepang pada tahun 2015.

A. Perbedaan Perspektif Korea Selatan dan Jepang Memandang Isu *Jugun Ianfu*

Isu *jugun ianfu* merupakan salah satu pembahasan penting bagi hubungan bilateral kedua negara terutama setelah berakhirnya Perang Dunia II. Pemerintah Korea Selatan pasca perang mencoba untuk mengungkapkan bagaimana kekejaman dan tindakan pelecehan yang telah dilakukan oleh militer Jepang pada masa kolonial dan meminta pertanggung jawaban berupa kompensasi yang sebanding dengan penderitaan yang dialami oleh rakyatnya terutama berkaitan dengan isu *jugun ianfu*. Walaupun kemudian isu ini belum berhasil diangkat ketika pemerintah Jepang pada saat itu justru menyatakan bahwa mereka tidak terlibat dalam isu tersebut, bahkan menyangkal adanya *jugun ianfu*. Para ilmuwan Korea Selatan meyakini bahwa aneksasi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang terhadap Korea Selatan merupakan hal yang ilegal dan pelanggaran terhadap hukum internasional. Para

Sarjana di Jepang sebenarnya dianggap cenderung mengakui bahwa pendudukan Jepang terhadap Korea merupakan tindakan yang brutal dan menyebabkan penderitaan yang luar biasa, namun mereka enggan mengakui bahwa aneksasi tersebut bersifat ilegal karena adanya kekuatan besar lainnya yang juga melakukan aneksasi kepada negara-negara kecil selama periode tersebut.

Dari sisi pemerintah Korea Selatan maupun Jepang, keduanya sama-sama memiliki perspektifnya masing-masing dalam menanggapi isu tersebut. Bagi Korea Selatan sebagai pihak yang merasa dirugikan atas kekejaman militerisme Jepang, pihaknya akan terus memberikan bukti yang menyatakan keterlibatan Jepang dalam *jugun ianfu*. Hal tersebut berkaitan dengan fakta bahwa militer Jepang dan organisasi pemerintah secara aktif berkolaborasi dalam penyusunan *jugun ianfu*. Selain itu, pemerintah Jepang juga menuntut para guru di sekolah untuk membantu siswanya secara sukarela mengajukan permohonan sebagai *jugun ianfu* atau wanita penghibur. Beberapa guru di sekolah kemudian membujuk para siswanya tersebut dengan mengatakan bahwa mereka dapat memperoleh uang dengan bekerja di pabrik dan tidak mengatakan apapun tentang situasi yang lebih baik, namun ternyata mereka justru dipekerjakan di rumah-rumah *jugun ianfu* atau *comfort sations*. Dari pandangan pemerintah Korea Selatan perekrutan para perempuan untuk bekerja sebagai *jugun ianfu* bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi perempuan selama perang, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara universal (Tempo.co, 2012). Para perempuan yang bekerja sebagai *jugun ianfu* tidak hanya mengalami kekerasan secara fisik tetapi juga trauma secara psikologis bahkan harus menanggung malu dan menyembunyikan pengalamannya selama bekerja sebagai *jugun ianfu*.

Selama ini belum ada penelitian yang menunjukkan secara pasti jumlah perempuan yang dipekerjakan sebagai *jugun ianfu* di *comfort stations* termasuk juga jumlah perempuan yang berasal dari Korea. Selain juga karena tidak ada dokumen resmi yang bisa menunjukkan secara pasti, berbagai pendapat yang muncul tentang jumlah *jugun ianfu* biasanya hanya didasarkan pada perkiraan yang dibuat oleh para peneliti. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dalam mengidentifikasi jumlah keseluruhan *jugun ianfu* diantaranya dilakukan pada rentan waktu antara tahun 1993 sampai tahun 1999. Para peneliti biasanya memperkirakan jumlah personel militer Jepang sebanyak 2,5 sampai 3 juta personel. Mengacu pada jumlah tersebut para peneliti tersebut kemudian memperkirakan jumlah *jugun ianfu* yang bekerja pada rumah-rumah bordil Jepang paling sedikit berjumlah 20 ribu dan perkiraan terbanyak adalah 410 ribu perempuan. Para peneliti yang melakukan penelitian tersebut diantaranya adalah Ikuhiko Hata, Yoshiaki Yoshimi, dan Su Zhiliang (Asian Womens Fund, tanpa tahun).

Di sisi lain, pemerintah Jepang bersikeras bahwa para *jugun ianfu* benar-benar mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai wanita penghibur. Sehingga permintaan maaf yang dituntut oleh pihak Korea Selatan merupakan hal yang tidak perlu untuk dilakukan kepada para *jugun ianfu*. Jepang juga menyatakan bahwa tidak ada yang salah dengan rumah wanita penghibur, para tentara memperlakukan mereka dengan baik dan secara hormat. Bagi pemerintah Jepang rumah bordil atau yang disebut juga dengan *comfort stations* tidaklah berbeda dengan tempat prostitusi lainnya yang pada saat itu dianggap sebagai sesuatu yang legal oleh pemerintah. Namun perbedaannya hanya terletak pada status *comfort stations* yang kepemilikan dan pendiriannya dilakukan

oleh pemerintah Jepang. Di mana para wanita yang dipekerjakan juga merupakan wanita yang direkrut terutama oleh kontraktor yang diberi lisensi oleh pemerintah. Pemerintah Jepang juga mengeluarkan izin khusus bagi para wanita tersebut untuk bepergian dan berpindah melalui kendaraan militer dan kapal laut. *Comfort stations* sendiri banyak didirikan oleh pemerintah Jepang di koloni dan juga wilayah yang didudukinya (Choi, 2013).

Sejarawan Jepang Ikuhiko Hata Ph.D menegaskan bahwa tidak pernah ada satu dokumen pun yang menyatakan bahwa otoritas pemerintah telah memaksa para perempuan di Semenanjung Korea untuk direkrut sebagai *jugun ianfu*. Pernyataan ini juga kemudian didukung oleh Yoshiaki Yoshimi dan Haruki Wada yang juga merupakan sejarawan yang berpandangan sama. Mereka menyatakan bahwa otoritas pemerintah yang melakukan pemaksaan dalam rekrutmen para *jugun ianfu* seperti pencarian budak di Korea tidak dikonfirmasi secara pasti (Nishioka, 2014).

Pemerintah Jepang beranggapan bahwa setiap permasalahan yang berkaitan dengan kompensasi sejarah serta tanggung jawab atas peraturan kolonial Jepang terutama dengan pihak Korea Selatan telah diselesaikan dalam perjanjian *Basic Relations* antara pemerintah Jepang dan Korea Selatan pada tahun 1965 termasuk juga berkaitan dengan isu *jugun ianfu*. Karena alasan itulah pemerintah Jepang lebih memilih untuk memberikan tanggung jawab secara moral dengan mendirikan *Asian Womens Fund(AWF)* dibandingkan memberikan tanggung jawab secara hukum. Namun bagi pemerintah Korea Selatan, permintaan maaf dan juga pendirian *Asian Womens Fund(AWF)* tersebut belumlah cukup untuk membayar dan melepaskan Jepang dari tanggung jawab atas kekejaman militernya selama periode sebelum dan selama Perang Dunia II.

B. Hubungan Bilateral Korea Selatan–Jepang Terkait *Isu Jugun Ianfu* Era Presiden Park Geun-hye

1. Periode Awal Kepemimpinan Presiden Park Geun-hye

Hubungan antara Korea Selatan dan Jepang telah mengalami pasang surut seiring dengan permasalahan mengenai isu sejarah masa lalu yang belum terselesaikan. Hal ini berkaitan dengan masalah ketika Jepang mengambil alih Korea Selatan, masalah terkait sengketa wilayah, serta beberapa isu lainnya. Korea Selatan dan Jepang sebenarnya telah menandatangani *Treaty on Basic Relations* antara pemerintah Korea Selatan dan Jepang pada tanggal 22 juni tahun 1965 di Tokyo. Dalam traktat tersebut kedua negara sepakat untuk saling menghormati kedaulatan masing-masing dan memperbaiki hubungan yang terjalin antara kedua negara sebagai upaya untuk menjunjung tinggi perdamaian dan keamanan Internasional (*United nations Treaty-series*, 1965). Hubungan bilateral antara kedua negara juga semakin mengalami kemerosotan ketika isu *jugun ianfu* mulai diangkat kembali pada sekitaran tahun 1990an. Isu *jugun ianfu* pun menjadi salah satu subjek negosiasi diplomatik antara kedua negara dan seringkali membuat hubungan kedua negara yang mulai membaik menjadi kembali merenggang.

Ketika Presiden Park Geun hye terpilih sebagai presiden Korea Selatan dan mulai dilantik pada februari 2013, salah satu agenda luar negeri yang menjadi fokus politiknya adalah memperbaiki hubungan dengan negara aliansinya termasuk dengan Jepang dan Amerika Serikat. Presiden Park juga mencoba untuk menyelesaikan *Asia's Paradox* yang terjadi antara pemerintah Korea Selatan, Jepang, dan China. Di mana ketiga negara tersebut merupakan negara-negara yang terpisah karena adanya kenangan buruk pada masa perang ditengah meningkatnya kondisi saling

ketergantungan ekonomi antar negara-negara (Nalwa, 2016).

Presiden Korea Selatan terpilih Park Geun Hye merupakan wanita pertama yang menjabat sebagai Presiden di negara tersebut. Park juga bukanlah orang baru dalam dunia perpolitikan Korea Selatan. Pasaunya Park Geun-hye merupakan putri dari Presiden ke-3 Korea Selatan yaitu Park Chung-hee yang juga merupakan seorang jendral militer dan seorang diktator Korea Selatan. Sejak kecil Park telah menghabiskan masa mudanya di istana kepresidenan atau *Blue House* selama ayahnya menjabat sebagai presiden. Pada sembilan bulan awal masa jabatannya sebagai Presiden, Park telah aktif terlibat dalam Konferensi Tingkat Tinggi bersama dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, China, Uni Eropa dan Rusia. Namun, Park Geun-hye dengan tegas menolak untuk mengadakan pembicaraan dengan negara tetangganya yaitu Jepang termasuk dengan Perdana Menteri Shinzo Abe dengan alasan perbedaan mereka dalam memahami isu sejarah (Hideki, 2015)

Salah satu hal penting yang menjadi awal dari perselisihan yang terjadi antara Korea Selatan dan Jepang adalah perbedaan interpretasi mereka dalam perjanjian penyelesaian masalah terkait properti dan tuntutan serta kerjasama ekonomi antara Jepang dan Korea Selatan (*Claims Settlement Agreement*) yang menjadi fokus dalam perjanjian normalisasi hubungan antara kedua negara pada tahun 1965 (Hideki, 2015, hal. 1). Dengan berjalannya waktu, terlihat bahwa kedua negara sering mengalami gesekan ditambah dengan munculnya kelompok-kelompok anti Jepang di Korea Selatan. Hal ini kemudian bisa mendorong dukungan bagi gerakan ekstrim di Korea Selatan. Walaupun kunjungan Presiden periode sebelumnya Lee Myung-bak ke Takeshima yang kemudian diikuti dengan pernyataan keras anti Jepang yang secara terus-

menerus disuarakan oleh pemerintahan Presiden Park Geun-hye kepada seluruh masyarakat Jepang dan Korea Selatan serta Internasional telah membuat sentimen Jepang terhadap Korea Selatan juga mengalami peningkatan.

Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan kembali mengalami ketegangan sejak pelantikan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk kedua kalinya pada bulan Desember tahun 2012. Ketika Perdana Menteri Shinzo Abe terpilih, kekhawatiran pemerintah Korea Selatan dan sebagian besar warganya menjadi semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena memburuknya hubungan yang terjalin antara Korea Selatan dan Jepang selama masa jabatan pertamanya sebagai Perdana Menteri Jepang ditahun 2006-2007. Ketegangan yang terjadi antara kedua negara tersebut sebagian besar dikaitkan dengan pernyataan pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Abe yang menyatakan akan meninjau ulang terkait dengan masalah sejarah saat perang dan juga berusaha untuk membatalkan pernyataan resmi yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Yohei Kono atau yang lebih dikenal dengan *Kono Statement* pada tahun 1993. Pernyataan ini menyatakan bahwa Jepang mengakui dan meminta maaf serta menyampaikan rasa bersalahnya atas perekrutan secara paksa kepada perempuan-perempuan di negara jajahannya sebagai *jugun ianfu* atau *comfort woman* selama periode sebelum dan selama Perang Dunia II. Selain *Kono Statement*, pemerintahan Abe juga berusaha untuk meninjau ulang *Murayama Statement* tahun 1995 yang pernah disampaikan oleh Perdana Menteri Tomiichi Murayama yang mengekspresikan perasaan bersalah dan juga permintaan maaf yang teramat dalam kepada para korban dari kekejaman kolonialisme dan juga militer Jepang selama periode sebelum dan selama Perang Dunia II.

Walaupun pada akhirnya Perdana Menteri Abe gagal dalam usahanya untuk membatalkan *Kono Statement*, Abe tetap tidak menyerah dan berencana untuk melakukan revisi terhadap pernyataan tersebut. Dalam kampanye pemilihan presiden Partai Demokrat Liberal (LDP) yang digelar pada tahun 2012, Abe menyatakan niatnya untuk merevisi dua permintaan maaf utama atas kesalahan Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang yaitu *Kono Statement* tahun 1993 dan juga *Murayama Statement* yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Tomiichi Murayama pada tahun 1995 yang meminta maaf atas kerusakan yang telah dilakukan oleh militer Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II dan selama masa penjajahan Jepang atas negara-negara tetangga (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2014). Perdana Menteri Abe juga menyatakan niatnya untuk memperkuat kampanye dalam rangka mendukung klaim Jepang atas pulau Dokdo/Takeshima. Di mana oleh warga Korea Selatan pulau ini disebut pulau Dokdo sedangkan bagi warga Jepang pulau ini disebut dengan pulau Takeshima. Selama ini status kepemilikan atas pulau ini masih diperebutkan antara Jepang dan Korea Selatan.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Abe telah mengkhawatirkan sebagian besar warga Korea Selatan. Hal ini karena menurut sebagian besar warga Korea Selatan pemerintah Jepang selama ini tidak benar-benar secara tulus meminta maaf dan berusaha untuk menebus kesalahan masa lalunya atau memberikan kompensasi sepenuhnya terkait dengan isu sejarah masa lalu. Mereka seringkali menolak pernyataan dari para pemimpin Jepang yang menyatakan bahwa Jepang telah menawarkan permintaan maaf yang lebih dari cukup kepada Korea Selatan dan bahwa setiap masalah yang berkaitan dengan kompensasi atas peraturan kolonial Jepang

telah diselesaikan dalam perjanjian *Basic Relations* antara pemerintah Jepang dan Korea Selatan pada tahun 1965.

Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Abe tentu dinilai akan mengganggu stabilitas hubungan yang terjalin antara kedua negara, kecuali jika Perdana Menteri Abe melupakan ambisinya untuk merevisi kembali sejarah perang dan menyetujui untuk mematuhi dan tetap mempertahankan pernyataan-pernyataan permintaan maaf di masa lalu, maka tidak akan sulit bagi Jepang dan Korea Selatan untuk mengembangkan hubungan kerjasama dan kemitraan yang lebih dekat lagi.

Pada awal tahun 2013 Perdana Menteri Abe mengeluarkan sebuah kebijakan luar negeri terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat. Di mana Jepang akan mengambil peranan yang lebih besar dalam politik Internasional dengan jalan menguatkan hubungan antara Jepang dengan Amerika Serikat, termasuk meningkatkan kekuatan pertahanannya dan juga revitalisasi ekonomi melalui kebijakan Abenomics. Jepang juga berusaha untuk meningkatkan hubungannya dengan Korea Selatan. Hal ini ditunjukkan dengan mengirimkan Nukaga Fukushiro pada bulan januari sebagai utusan khusus untuk bertemu dengan presiden Park Geun-hye. Dalam pertemuan tersebut, Nukaga menyampaikan surat yang dikirim oleh Perdana Menteri Abe, yang mana pemimpin Jepang tersebut berjanji untuk menjalin hubungan kerjasama yang lebih baik dengan Korea Selatan. Perdana Menteri Abe juga memuji bahwa Korea Selatan sebagai negara tetangga yang sangat penting untuk saling berbagi nilai-nilai demokrasi dan juga pasar ekonomi bagi Jepang. Sebagai wujud penghargaan terhadap sikap diplomatik ramah yang ditunjukkan oleh Perdana Menteri Abe, Presiden Park menjelaskan kepada utusan yang dikirim oleh Abe

bahwa kerjasama yang terjalin antara Korea Selatan dengan Jepang akan sangat bergantung pada kebijakan-kebijakan Jepang dalam memandang isu sejarah dan juga wilayah yang melibatkan kedua negara.

Pada musim semi tahun 2013 hubungan bilateral antara Jepang dan Korea Selatan kembali memburuk, hal ini disebabkan oleh pandangan revisionis pemerintahan Abe terkait dengan sejarah yang akhirnya membuat kesal pemerintah Korea Selatan. Korea Selatan kemudian meminta pihak Jepang untuk membuat pengakuan dan permintaan maaf secara penuh atas tindakan yang telah dilakukan Jepang di masa lalu terhadap Korea Selatan. Dengan melakukan tindakan tersebut, Seoul menjelaskan kepada Tokyo bahwa kecuali Jepang mengakui kesalahan masa lalunya dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi, maka akan sulit bagi pemerintah Korea Selatan untuk percaya dan membangun kemitraan dengan pemerintah Jepang.

Walaupun saat itu pemerintahan Abe lebih fokus pada memulihkan kebanggaan dan rasa percaya diri pemerintah Jepang, akan tetapi kedua pemimpin negara baik Perdana Menteri Abe maupun Presiden Park sama-sama tidak saling berkompromi satu sama lain. Keduanya saling menempatkan kesatuan tempur dari kekuatan domestik keduanya berada di belakang masing-masing. Perdana Menteri Abe tetap harus mempertahankan sikap tanpa komprominya untuk mengatasi tekanan dari kelompok ekstrimis sayap kanan Jepang. Salah satu contohnya adalah partai restorasi yang menganjurkan agar pemerintah segera melakukan revisi terhadap sejarah dan menolak pernyataan atas rasa bersalah dan juga tanggung jawab apapun terkait dengan sejarah masa perangnya. Sementara itu, Presiden Park harus mempertahankan kepercayaan sebagai seorang pemimpin nasionalis yang akan berjuang untuk melawan pemerintah Jepang,

hal ini juga didukung oleh latar belakang Presiden Park yang berasal dari keluarga mantan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee yang seringkali digambarkan sebagai seorang pemimpin yang pro Jepang oleh kelompok sayap kiri di Korea Selatan.

Sebuah gaya diplomatik baru ditunjukkan oleh Seoul dan Tokyo yang dipicu oleh upaya pemerintah Abe yang menolak tuduhan terkait dengan agresi pemerintah Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II. Dalam kesaksiannya dihadapan Penasehat Komite Anggaran Dewan Jepang pada tanggal 22 April, Perdana Menteri Abe menunjukkan bahwa dia tidak akan meneruskan permintaan maaf yang dilakukan oleh mantan Perdana Menteri Tomichii Murayama yang mulai dilakukan sejak tahun 1995 atas kesalahan Jepang pada saat perang. Setelah tahun 1995, permintaan maaf tersebut sangat dijunjung tinggi oleh kabinet Jepang termasuk juga oleh pemerintahan Abe pada periode pertamanya di tahun 2006-2007. Hal itu dianggap sebagai salah satu permintaan maaf penting bagi pemerintah Jepang atas agresi perang dan pemerintah kolonialnya di Asia. Dalam kesaksiannya, Perdana Menteri Abe menyatakan bahwa dirinya tidak sepenuhnya menerima *Murayama Statement*.

Pernyataan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Abe kemudian menyebabkan kegemparan di Korea Selatan, China, dan juga beberapa negara lain di Asia. Selain negara-negara Asia, pernyataan tersebut juga sekaligus mengkhawatirkan pemerintah Amerika Serikat. Pernyataan pemerintah Jepang yang menyangkal atas kesalahan dan tanggung jawab Jepang atas agresi militernya terutama sekali telah memancing amarah orang-orang Korea Selatan. Mengingat bagaimana tindakan yang telah dilakukan oleh Jepang selama masa pemerintahan kolonial di semenanjung Korea yang dimulai sejak tahun 1910 sampai dengan tahun 1945. Pada tanggal 29 April, Majelis Nasional

Korea Selatan mengadopsi sebuah resolusi yang menyinggung kunjungan wakil Perdana Menteri Aso Taro ke kuil Yasukuni dan juga pandangan revisionist yang dilakukan oleh Perdana Menteri Abe terkait masalah sejarah. Setelah pernyataan revisionis Perdana Menteri Abe, banyak pihak yang merasa khawatir bahwa Abe akan mencabut permintaan maaf yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Kepala Sekretaris Kabinet Yohei Kono pada tahun 1993 dan Perdana Menteri Tomiichi Murayama pada tahun 1995.

Menjelang akhir bulan April, lebih dari 170 anggota Diet LDP termasuk beberapa anggota kabinet Perdana Menteri Abe mengunjungi Kuil Yasukuni yang kemudian membuat harapan untuk segera menggelar pertemuan antara pihak Korea Selatan-Jepang menjadi pupus. Korea Selatan secara tegas menyatakan ketidaksenangannya dengan membatalkan kunjungan Menteri Luar Negerinya ke Tokyo untuk pertemuan yang dijadwalkan dengan mitranya dari Jepang. Selain itu, menyimpang dari tatanan diplomatik yang telah berlangsung lama, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye dalam kunjungannya sebagai presiden Korea Selatan yang baru terpilih lebih memilih untuk mengunjungi China terlebih dahulu pada bulan Juni 2013 dibandingkan dengan Jepang.

Keputusan Hakim yang memenangkan partai LDP dalam pemilihan Majelis Tinggi (*Sanfgiin*) pada bulan juli 2013, menjamin kontrol Abe terhadap kedua majelis di Diet, dalam koalisinya dengan Partai Komeito Baru untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir. Setelah kemenangan ini, sudah jelas bahwa Perdana Menteri Abe akan terus mencoba untuk merevisi konstitusi Jepang dalam rangka meningkatkan kemampuan militer dan anggaran pertahanannya. Walaupun tidak mudah bagi Korea Selatan untuk menerima usaha Jepang yang terus meningkatkan kemampuan militernya, serta disebabkan karena

penolakan pemerintahan Abe atas tuntutan pengakuan kesalahan masa lalu dan juga tindakan militernya. Seoul secara jelas merasa khawatir terkait dengan rencana Perdana Menteri Abe untuk mengubah pasal 9 konstitusi Jepang (menyangkut penolakan perang sebagai hak kedaulatan), yang mungkin bisa saja mengizinkan perombakan secara penuh dalam sistem persenjataannya. Seperti peningkatan militer atau sistem persenjataan dalam skala besar yang mungkin bisa menimbulkan ancaman bagi negara-negara tetangga Jepang termasuk Korea Selatan.

Sehubungan dengan perayaan ulang tahun ke-68 penyerahan kekuatan Jepang kepada kekuatan Sekutu, Korea Selatan dengan hati-hati terus mengamati dan melihat apakah para pemimpin Jepang akan mengunjungi Kuil Yasukuni pada tanggal 15 Agustus 2013. Pada malam perayaan ini, Seoul mengirim pesan yang jelas kepada pemerintah Abe yang menyatakan bahwa mereka akan menentang segala bentuk kunjungan. Perdana Menteri Abe kemudian meninggalkan masalah terkait dengan kunjungan ke kuil Yasukuni kepada masing-masing anggota kabinet dan menarik diri untuk terlibat dengan masalah ini. Namun, Seoul tetap menyesalkan pidato yang disampaikan oleh Perdana Menteri Abe pada tanggal 15 Agustus bertepatan dengan peringatan ulang tahun menyerahnya Jepang tanpa syarat kepada kekuatan sekutu. Dalam pidatonya, Abe menyimpang dari apa yang telah dipraktikkan para pendahulunya dengan tidak meneruskan tradisi mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalan yang mendalam atas agresi militer Jepang pada masa perang. Bahkan Abe juga tidak memberikan pernyataan yang menegaskan kembali janji Tokyo untuk tidak akan pernah melakukan perang lagi.

Pada perayaan festival tahunan musim gugur di bulan oktober, Perdana Menteri Abe kembali menahan

diri untuk melakukan kunjungannya ke kuil Yasukhuni. Sikap damai yang ditunjukkan oleh Abe ini namun tidak ditanggapi serius oleh oleh kritikus domestik maupun luar negerinya. Hal ini disebabkan karena Perdana Menteri Abe tetap menyatakan penyesalannya karena tidak dapat mengunjungi tempat tersebut yang dianggap sebagai tempat suci dan bersejarah, sedangkan kunjungan ke kuil Yasukhuni tetap dilakukan oleh lebih dari 160 anggota Diet yang berasal dari partai LDP. Rupanya usaha Perdana Menteri Abe untuk menghindari melakukan kunjungan ke kuil Yasukhuni adalah karena Jepang sedang terlibat dalam negosiasi bersama dengan pemerintah Seoul dan Beijing untuk mengadakan *Trilateral Summit*. Perdana Menteri Abe berusaha untuk menghindari hal-hal yang mungkin saja bisa mengganggu negosiasi bersama dengan kedua negara tersebut, terutama hal ini berkaitan dengan sejarah masa perang Jepang dan kunjungan ke kuil Yasukhuni yang merupakan hal sangat sensitif terutama bagi Korea Selatan dan China.

Pada tanggal 7 Oktober, sebuah pertemuan diselenggarakan antara wakil pejabat Menteri dari Korea Selatan, Jepang, dan China. Pertemuan ini diadakan di Seoul yang membahas tentang kemungkinan ketiga negara untuk melakukan pertemuan trilateral. Walaupun pada akhirnya perundingan ini segera terhenti akibat meningkatnya ketegangan yang terjadi antara pemerintah Jepang dan China atas kepulauan Senkaku/Diaoyu. Ketegangan yang terjadi juga semakin diperparah dengan dikeluarkannya Zona Identifikasi Udara atau *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* oleh pemerintah China secara unilateral di wilayah laut China Selatan. Wilayah ini kemudian mencakup pulau Senkaku/Dioyu yang sedang disengketakan oleh kedua negara.

Di bawah tekanan yang kuat dari pihak Amerika Serikat, diplomat Korea Selatan dan Jepang

melanjutkan diskusi bilateral antara kedua negara untuk mencari kemungkinan diadakannya pertemuan antara Presiden Park dan Perdana Menteri Abe. Kemungkinan pertemuan ini bisa saja dilakukan di sela-sela Konferensi Davos di Swiss pada bulan Januari 2014. Namun, pertemuan bilateral tersebut tidak terlaksana karena keengganan pemerintah Tokyo untuk memenuhi permintaan Seoul. Hal ini terkait dengan tuntutan Seoul yang meminta Abe berjanji untuk mematuhi permintaan maaf terkait dengan sejarah dan juga para korban *jugun ianfu*, serta memberikan bantuan kepada para korban tersebut sebagai dukungan kemanusiaan walaupun hal tersebut kemudian tidak disetujui oleh Tokyo.

Ditengah harapan untuk bisa menggelar pertemuan antara pihak Tokyo dan Seoul, Perdana Menteri Abe justru mengejutkan banyak pihak atas kunjungannya ke kuil Yasukuni pada tanggal 26 Desember. Hal ini kemudian memancing amarah dari para korban kekejaman militer Jepang sebelum dan selama Perang Dunia II. Baik Korea Selatan ataupun China telah berulang kali menyampaikan kemarahan akibat kunjungan para pemimpin Jepang ke kuil tersebut. Kuil tersebut merupakan tempat bagi 14 pemimpin Jepang yang dihukum sebagai penjahat perang kelas-A oleh pengadilan militer sekutu di Tokyo. Setelah Perang Dunia II, mereka justru dihormati karena termasuk dalam 2,4 juta orang yang tewas dalam pertempuran. Bagi Korea Selatan dan China, kunjungan para pemimpin Jepang ke kuil ini merupakan hal yang sangat sensitif. Karena mereka menganggap bahwa kuil Yasukuni merupakan simbol militerisme dan kekejaman militer Jepang serta sebagai simbol ketidaktaatan Tokyo dan sumber dari pandangan yang salah tentang masa lalu. Perdana Menteri Abe merupakan salah satu pemimpin Jepang pasca perang yang memberikan penghormatan di kuil

Yasukuni sejak masa jabatan pertamanya pada tahun 2006.

Menanggapi berbagai amarah yang datang dari Korea Selatan dan China, Perdana Menteri Abe menyatakan bahwa kunjungannya ke kuil tersebut bukanlah untuk menyembah penjahat perang, melainkan memberikan penghormatan dan juga melaporkan kepada jiwa-jiwa yang tewas dalam perang atas kemajuan apa yang berhasil dilakukan di bawah pemerintahannya. Selain itu juga untuk menyampaikan tekadnya bahwa orang-orang Jepang tidak akan pernah lagi menderita akibat perang. Abe juga menambahkan bahwa sebenarnya ia tidak berniat sama sekali untuk menyakiti perasaan orang-orang Korea Selatan dan China. Namun bagi orang-orang Korea Selatan dan China, kunjungan Abe ke kuil tersebut tidak hanya memberikan penghormatan kepada 2,4 juta orang yang tewas dalam perang tetapi juga kepada 14 penjahat perang kelas-A yang dihukum karena kejahatan perangnya. Kaisar Jepang Hirohito dan Akihito pun berhenti untuk mengunjungi Kuil Yasukuni setelah tahun 1978, ketika 14 penjahat perang Kelas-A ditambahkan sebagai mereka yang terhormat di tempat suci tersebut.

Korea Selatan menyebut kunjungan tersebut sebagai tindakan yang tercela dan akronistik karena akan berpotensi merusak hubungan antara kedua negara. Seorang juru bicara pemerintah Park menyatakan bahwa Korea Selatan tidak dapat menghindari rasa marah akibat kunjungan Abe ke kuil Yasukuni. Kunjungan itu juga dijelaskannya sebagai bentuk pemahaman yang keliru dari Jepang tentang sejarah yang secara fundamental akan merusak bukan hanya hubungannya dengan Korea Selatan melainkan juga stabilitas di Asia Timur. Sebagian besar orang Korea bahkan menganggap kunjungan Abe sebagai tindakan yang membenarkan agresi perang Jepang.

Bahkan, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil Duta Besar Jepang untuk Korea Selatan guna memprotes kunjungan tersebut.

Setelah kunjungan Abe ke kuil Yasukuni, Korea Selatan memutuskan untuk membatalkan perundingan tingkat wakil kementerian dengan Jepang yang telah dijadwalkan pada bulan Januari 2014. Ini juga menjadi bukti bahwa citra Abe telah ternoda sebagai akibat keputusannya tersebut. Setelah kunjungannya ke kuil tersebut, beberapa media Amerika Serikat yang berpengaruh misalnya *New York Times*, *Washington Post*, dan lain-lain pun mulai mengkritik perilaku Abe yang tidak sensitif.

Menyusul kunjungan Abe pada 26 Desember, para pemimpin pemerintah Korea Selatan mengungkapkan keraguan mereka tentang apakah pemimpin Jepang akan mematuhi permintaan maaf pada masa lalu. Presiden Park juga mendesak pemerintah Abe untuk menghormati permintaan maaf masa lalunya tersebut. Menurut Park, hubungan Korea Selatan-Jepang telah berkembang selama bertahun-tahun karena para pemimpin politik Jepang telah dengan jelas menyatakan pemahaman mereka tentang sejarah yang benar. Park juga dengan keras menegur kepemimpinan Jepang saat ini karena tidak menunjukkan penyesalan atas kebrutalan masa lalunya selama pemerintahan kolonial atas Korea, khususnya yang melibatkan wanita penghibur atau *jugun ianfu*.

2. Periode Setelah 1 Tahun Kepemimpinan Presiden Park Geun-Hye

Pada awal musim semi tahun 2014, hubungan Korea Selatan dan Jepang mencapai titik terendah ketika pemerintah Abe memutuskan untuk memeriksa kembali bukti-bukti yang digunakan dalam penyusunan *Kono Statement* tahun 1993. Pada tanggal 28 Februari, Sekretaris Kabinet Suga Yoshihide mengumumkan

keputusan pemerintah Abe untuk "Memeriksa kembali" keabsahannya. Untuk tujuan itu kemudian dibentuklah tim penyidik dalam pemerintah untuk meneliti bukti-bukti terutama kesaksian 16 mantan wanita penghibur Korea yang telah digunakan dalam menyusun *Kono Statement*. Dalam dokumen itu, Sekretaris Kabinet Yohei Kono untuk pertama kalinya mengakui bahwa militer kekaisaran Jepang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan memaksa wanita penghibur tersebut untuk memberikan pelayanan seksual kepada tentara Jepang selama Perang Dunia II. Namun, Suga tidak mengatakan apakah penyelidikan yang direncanakan akan mengarah pada pembatalan, modifikasi, atau pencabutan terhadap *Kono Statement*. Setelah pengumuman yang dilakukan oleh Sekretaris Kabinet Suga, banyak orang Korea Selatan yang menganggap bahwa pemeriksaan ulang yang dilakukan oleh pemerintah Abe merupakan upaya yang jelas untuk menghapuskan tanggung jawab Jepang atas isu *jugun ianfu*.

Menanggapi hal tersebut pemerintah Korea Selatan melakukan tindakan untuk meningkatkan kampanye anti Jepang dengan mendistribusikan berbagai materi ke masyarakat asing, termasuk video dan pamflet yang mengkritik pelanggaran hak asasi perempuan oleh Jepang dalam kasus *jugun ianfu*. Dengan tindakan tersebut, pemerintah Park menunjukkan bahwa mereka memandang upaya pemerintah Abe untuk menarik kembali permintaan maaf masa lalu Jepang atas *jugun ianfu* sebagai bukti nyata ketidaksediaan Jepang untuk menebus kesalahannya. Dalam keadaan seperti ini, Park menolak untuk bertemu dengan Abe sampai pihak Jepang menunjukkan lebih banyak penyesalan terkait masalah ini. Pada dasarnya Presiden Park menjelaskan bahwa kecuali sampai pemerintah Abe berjanji untuk

mematuhi Murayama dan *Kono Statement*, tidak akan ada pertemuan antara Korea Selatan dan Jepang.

Pada tanggal 1 Maret saat peringatan pemberontakan Korea tahun 1919 melawan pemerintah kolonial Jepang, Park mendesak Abe untuk jujur dan cukup berani untuk menghadapi agresi negaranya di awal abad ke 20 ini, terutama yang berkaitan dengan perbudakan perempuan Asia. Sementara itu, perdebatan wilayah terutama pulau Dokdo atau Takeshima bagi Jepang juga memperburuk hubungan bilateral yang sudah tegang antara Korea Selatan dan Jepang. Perselisihan teritorial tersebut telah menjadi sumber utama ketegangan antara kedua negara sejak penandatanganan Perjanjian Perdamaian San Francisco tahun 1951. Meskipun Jepang telah menyatakan bahwa mereka memasukkan Batu Liancourt sebagai terra nullius (pulau tanpa pemilik) di prefektur Shimane Jepang pada tahun 1905, Korea Selatan telah mempertahankan bahwa itu adalah sebuah pulau milik Korea Selatan dan bukanlah wilayah terra nullius yang secara tidak sah dirampas oleh Jepang dan merupakan sebuah pelanggaran hukum internasional.

Sementara itu, kemunduran dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang menimbulkan banyak kekhawatiran bagi pihak pemerintahan Obama, sehingga pemerintah Amerika Serikat berencana untuk mempertemukan kedua pemimpin negara. Pada 12 Maret, sebagai upaya untuk membahas kemungkinan *Trilateral Summit*, pemerintah Abe mengirim Wakil Menteri Luar Negerinya Saiki Akitaka ke Seoul. Dalam pembicaraan dengan rekannya dari Korea Selatan Kim Kyu-Hyun, Saiki mengungkapkan keinginan Jepang untuk memperbaiki hubungan bilateral dengan Korea Selatan dan mengadakan *Trilateral Summit* bersama. Namun, pihak Korea Selatan menyatakan bahwa Jepang harus mengadopsi pemahaman yang benar dan tepat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan sejarah,

termasuk isu *jugun ianfu*. Karena menurutnya pemahaman Jepang yang benar terkait dengan isu-isu yang berhubungan dengan sejarah adalah kunci bagi perbaikan hubungan kedua negara. Pada hari yang sama saat kunjungan Saiki ke Seoul, Sekretaris Kabinet Suga kembali membantah keterlibatan pemerintah dan militer Jepang dalam perekrutan wanita-wanita penghibur atau *jugun ianfu*. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa pemerintahnya akan memeriksa kembali bukti yang digunakan dalam penyusunan *Kono Statement*.

Melihat bahwa pemerintah Korea Selatan enggan untuk mengadakan *Trilateral Summit* dengan Jepang tanpa syarat, pemerintah Abe memutuskan untuk membatalkan rencananya merevisi atau membatalkan *Kono Statement*. Hal ini kemudian disambut baik oleh Presiden Korea Selatan. Presiden Park melalui juru bicara kepresidenan menyatakan harapan bahwa pernyataan Abe akan menjadi awal dimulainya hubungan yang lebih kuat antara Korea Selatan dan Jepang serta negara-negara Asia Timur lainnya.

Pada tanggal 20 Maret, Seoul dan Tokyo mengumumkan kesediaan mereka untuk berpartisipasi dalam *Trilateral Summit* bersama dengan Amerika Serikat di sela-sela KTT Keamanan Nuklir 2014 di Den Haag. Dimana *Trilateral Summit* ini merupakan inisiatif yang diambil oleh pemerintahan Obama. Pada *Trilateral Summit* yang diadakan pada tanggal 25 Maret, Abe and Park mengadakan pertemuan resmi pertama mereka. Bersama Presiden Obama, mereka terutama membahas situasi keamanan di Asia Timur pada umumnya dan tantangan ancaman nuklir Korea Utara pada khususnya. Mereka sepakat untuk mengadakan pertemuan wakil menteri tingkat tinggi trilateral mengenai masalah pertahanan dan keamanan di Washington pada 17 sampai 18 April. Setelah

pertemuan trilateral di Den Haag, hubungan antara Korea Selatan dan Jepang diperkirakan semakin membaik. Hal ini ditandai dengan komitmen kedua negara yang kemungkinan akan mengadakan pertemuan bilateral (Kim, 2014).

Hubungan kedua negara yang sudah membaik kembali merenggang dipertengahan tahun 2015. Tepatnya pada bulan juni, hal itu terkait dengan isu prasasti dari fasilitas industri Jepang modern yang juga disebut dengan *Battleship Island* yang masuk dalam daftar warisan budaya dunia UNESCO. Pihak Jepang yang memenangkan pengakuan UNESCO atas prasasti tersebut kemudian memancing kemarahan dari para pejabat di Korea Selatan. Korea Selatan menganggap bahwa Jepang tidak cukup menggambarkan penggunaan pekerja paksa di pabrik selama masa perang. Walaupun tidak secara langsung berkaitan dengan isu sejarah terutama *jugun ianfu*, hal ini kemudian juga berdampak pada terhambatnya konsultasi antara kedua negara terkait penyelesaian isu tersebut sehingga negosiasi yang sedang berlangsung belum menunjukkan kemajuan yang signifikan (Eilperin, 2016).